

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badan Pengkajian MPR RI dan APHTN-HAN, 2017, *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, MPR, Jakarta.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, In-Hill-Co, Jakarta.
- _____, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH-UII Press, Yogyakarta.
- C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasara Raya, Padang.
- Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI, 2020, *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Herman Sihombing, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- J.S.T Simorangkir, 1986, *Hukum dan konstitusi Indonesia 2*, Gunung Agung, Jakarta.
- Maria Farida Iindrati S, 2017, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, PT. Kanisius, Yogyakarta
- Muhammad Yamin, 1959, *Naskah-Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Disiarkan dengan Dibubuhi Tjataan, Volume 1, Jajasan Prapantja, Jakarta.
- Muin Fahmal, 2008, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV Jilid 1.
- Nimatul Huda, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945*, FH-UII Press, Yogyakarta.

_____, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, FH UII Press, Yogyakarta.

Padmo Wahyono, 1998, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Putra Perdana Ahmad Saifulloh, 2017, *Rekonstruksi Hierarki, dan pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dalam perspektif peraturan darurat*, Badan Pengkajian MPR, Jakarta.

RM.A.B. Kusuma, 1998, *Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.

_____, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, dan Purnadi Purbacaraka, 1994, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, dkk, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Solly Lubis, 1997, *Pembahasan UUD 1945*, cetakan ke-5 (revisi), PT. Alumni, Bandung.

Suratman, dkk, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, CV Alfabeta, Bandung.

Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, 2011 *Sumber Hukum Nata Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusril Ihza Mahendra, 2016, *Buku Satu; Hukum & Perundang-Undangan*, Pro Deleader, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1946 tentang Pernyataan Keadaan Bahaya

Undang-Undang (Prp) 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *j.o* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

C.Tesis, Disertasi, Jurnal dan Majalah

Andi Yuliani, 2016, "*Kegentingan Yang Memaksa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*", Tesis : UI Depok.

Agus Adhari, 2019, "*Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", *Dialogia Iuridicia Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 11 No 1, Maranatha.

A.Hamid S. Attamimi, 2020, "*Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*", Artikel dalam majalah hukum dan pembangunan, Edisi Khusus Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Indonesia ke-XXXVI, tahun ke-XV.

Bagir Manan dan Susi Dwiharjanti, 2017, "*Perpu Dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum*", *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol 4.

Carl Schmitt, 2005, "*Political Theology: Four Chapters on Theory of Sovereignty*", Terjemahan George Schwab, University of Chicago Press, Chicago,.

- Chrisdianto Eko Purnomo, 2010, "*Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia*", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, April 2010.
- Daniel Yusmic P.Foekh, 2011, "*pengaturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu)*" Disertasi Program Doctor, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Didik Duhariyanto, 2021, "*Problematika penetapan perppu kondisi negara dalam keadaan darurat dalam sistem hukum Indonesia*", Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021.
- Fitra Arsil, 2018, "*Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial*", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. (1), 2018, 1-21.
- Georgio Agamben, 2005, "*State of Exception*, Chicago: The University of Chicago" Press.
- _____, 2017, "*The Omnibus Homo Sacer*", Stanford: Stanford University Press.
- Jazim Hamidi & Mustafa Lutf, 2009, "*Ketentuan konstitusional pemberlakuan keadaan darurat dalam suatu negara (model perbandingan konstitusi antara negara Indonesia dengan amerika serikat dalam perspektif politik hukum)*", Jurnal Konstitusi, Volume 6, No 1 April 2009, Mahkamah Konstitusi.
- J. Mark Payne, Daniel Zovatto G dan Mercedes Mateo Díaz, 2007, "*Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*", Inter-American Development Bank, Washington, Volume 89: 1777, 1777-1805.
- Malik, 2013, "*Perppu Pengawasan Hakim MK Versus Putusan Final MK*", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.
- Mahkamah Konstitusi, "*KONSTITUSI* ", Majalah Konstitusi, Volume 170, April 2021.
- Moh. Rizaldi, 2020, "*Pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja negara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*", Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 2-Agustus 202, Legacy.
- Rizki Bagus Prasetio, 2021, "*Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan Ham*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 5 No. 2, Sinta.

Scott P. Sheeran, 2013, “*Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics*”, Michigan Journal of International Law, Volume 34, Issue 3.

Siti Nurhalimah, 2020, “*Menyoal Kegentingan yang Memaksa*” Jurnal Adalah Buletin Hukum dan Keadilan Volume 4 Nomor 1.

Stephen Humphreys, 2006, “*Legalizing Lawlessness: On Giorgio Agamben’s State of Exception*”, The European Journal of International Law, Volume 17 No. 3.

Transparency International Indonesia & AIPJ 2, 2021, “*Implikasi Pergeseran Kewenangan dalam Kebijakan Anggaran Penanganan Covid-19*”.

E. Internet

CNN Indonesia, “*MK Tolak Uji Materi Perppu Corona Jokowi*”
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200623122815-12-516394/mk-tolak-uji-materi-perppu-corona-jokowi>

Hukum Online, “*Pandangan Jimly Terkait Perppu Penanganan Covid-19*”
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaf518c0f3c3/pandangan-jimly-terkait-perppu-penanganan-covid-19/>

Kementerian keuangan, “*Perppu No. 1 Tahun 2020 Disahkan jadi Undang-Undang*”
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/perppu-no12020-disahkan-jadi-Undang-Undang/>

Susi Dwi Harijanti dalam Kuliah Umum berjudul, “*CALS:Kuliah Daring Hukum Tata Negara 1*”
<https://www.youtube.com/watch?v=aReh26YsgwA&t=237s>

World Health Organization, “*Pneumonia of unknown cause – China*”,
<https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unknown-cause-china/en/>

_____, “*Coronavirus disease (COVID-19) outbreak*”,
<https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19>